

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
DALAM ERA DESENTRALISASI FISKAL**



Naskah Publikasi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

ANGGIT DARMASTUTI AJI

B 200 090 088

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DALAM
ERA DESENTRALISASI FISKAL.**

Yang ditulis oleh :


ANGGIT DARMASTUTI AJI

B 200 090 088

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Februari 2013

Pembimbing


(Drs. M. Abdul Aris, M.Si.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Priyono, S.E., M.Si)

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
DALAM ERA DESENTRALISASI FISKAL**

ANGGIT DARMASTUTI AJI

B 200 090 088

ABSTRAK

Sejak diberlakukan otonomi daerah tahun 2001, seluruh kewenangan berada pada pemerintah pusat, terutama masalah keuangan daerah. Desentralisasi fiskal salah satu wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri dalam era desentralisasi fiskal dari tahun 2006-2011. Penelitian ini menggunakan data penerimaan Pajak Daerah, jumlah wisatawan, jumlah industri (kecil, menengah, dan besar), dan jumlah daya listrik tersambung.

Hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh kesimpulan bahwa jumlah wisatawan dan jumlah daya listrik tersambung memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri, sedangkan jumlah industri tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri.

Kata kunci: *pajak daerah, jumlah wisatawan, jumlah industri, daya listrik tersambung*

A. PENDAHULUAN

Penerimaan daerah yang optimal dapat dijadikan tolok ukur prestasi suatu daerah dalam menerapkan otonomi daerah. Daerah yang mampu mandiri, aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan pembangunan daerahnya akan mampu mempertahankan kemakmuran daerahnya, tidak hanya target dalam kurun waktu jangka pendek tetapi juga jangka panjang.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, Pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam meningkatkan penerimaan daerahnya. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menyebabkan pemerintah daerah pandai-pandai untuk menggali sektor-sektor mana saja yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang nantinya hasil pajak daerah tersebut dapat digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Kabupaten Wonogiri sejak diberlakukannya otonomi daerah, pembangunan daerahnya mulai mengalami peningkatan, khususnya pada sektor pariwisata dan industri. Pada sektor pariwisata nampak pada sarana hiburan atau wisata yang mampu menarik minat wisatawan lokal maupun nonlokal untuk berkunjung. Hal ini dimanfaatkan para pengelola hotel dan restoran untuk mengembangkan usaha mereka. Pada tahun 2011 menurut data BPS Kabupaten Wonogiri jumlah wisatawan mencapai 438.049 dan pada sektor industri untuk tahun 2011 didominasi oleh perusahaan kecil sebanyak 1.002 usaha dari 1.091 usaha.

Sektor-sektor tersebut tidak akan berjalan lancar tanpa adanya daya listrik. Setiap Wajib Pajak pribadi atau badan akan membutuhkan listrik sebagai sarana produksi dan aktivitas sehari-hari. BPS mencatat pada tahun 2011 pemakaian listrik mencapai 208.352.661 kwh.

Banyaknya potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Wonogiri tersebut dan dilihat dari peningkatan pajak daerah dari tahun 2006-2011 yang terus mengalami kenaikan mendorong dilakukan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian yang dilakukan Arshad Darlmalshah Tamara (2009) dengan mengadopsi salah satu variabel yaitu jumlah industri, dan menambahkan dua variabel yaitu jumlah wisatawan dan daya listrik tersambung.

Berdasarkan uraian di atas penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, jumlah industri, dan daya listrik tersambung terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2006-2011.

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Konsep dasar otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Keadaan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat apabila terus berlangsung akan menyebabkan beban anggaran pada pemerintah pusat.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengertian Pajak Daerah

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H: iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tiada mendapat jasa timbal yang secara langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan Pajak Daerah sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah terbesar, kemudian disusul oleh pendapatan dari retribusi daerah yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah pembangunan daerah (Suparmoko, 2002: 55).

Menurut UU No.28 Tahun 2009 pasal 2 ayat (2), jenis pajak kabupaten atau kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3. Jumlah Wisatawan

Menurut Veronika (2003), yang disebut wisatawan adalah mereka yang mengadakan perjalanan untuk kesenangan karena alasan keluarga, kesehatan, adanya pertemuan atau tugas-tugas tertentu, dan tujuan usaha. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung akan menyebabkan pelaku ekonomi di sekitar objek wisata akan meningkatkan pelayanannya. Sehingga semakin besar pajak daerah yang dipungut yaitu mengenai pajak hotel, restoran, dan hiburan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Jumlah wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri

4. Jumlah Industri

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan menjelaskan kriteria pengelompokan industri, yaitu Industri Kecil, Menengah, dan Besar. Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal kekayaan bersih perusahaan sampai dengan Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil. Bila modal kekayaan bersih perusahaan seluruhnya diatas Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Menengah. Bila modal kekayaan bersih perusahaan seluruhnya diatas Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar. Semakin banyak jumlah industri yang berkembang, pajak daerah yang dipungut akan meningkat yaitu Pajak Reklame. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri

5. Daya Listrik Tersambung

Menurut Veronika (2003), salah satu fasilitas infrastruktur yang dipilih oleh masyarakat adalah listrik, dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat bahwa semakin besar penggunaan energi listrik maka semakin besar pajak daerah yang dipungut. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Daya listrik tersambung berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasarkan pada laporan instansi-instansi antara lain: Dinas Pendapatan dan Badan Pusat Statistik

(BPS) Kabupaten Wonogiri dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu jumlah wisatawan, jumlah industri, dan daya listrik tersambung Kabupaten Wonogiri tahun 2006-2011.

2. Variabel Penelitian dan Pengukurannya

a. Variabel Dependen

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri diperoleh dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Parkir, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Pajak Daerah termasuk salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang turut memberi kontribusi dalam mengoptimalkannya. Penerimaan Pajak Daerah ini dinyatakan dalam satuan rupiah.

b. Variabel Independen

- 1) Jumlah Wisatawan, data diambil dari buku “Wonogiri Dalam Angka” Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 dan dinyatakan dalam satuan orang.
- 2) Jumlah industri, data diambil dari buku “Wonogiri Dalam Angka” Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 dan dinyatakan dalam satuan unit.
- 3) Daya Listrik, data diambil dari buku “Wonogiri Dalam Angka” Kabupaten Wonogiri Tahun 2006-2011 dan dinyatakan dalam satuan kwh.

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik meliputi (uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi), dan uji hipotesis (uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi).

C. HASIL PENELITIAN

Pada hasil Uji F dinyatakan bahwa model regresi yang digunakan mampu memprediksi penerimaan pajak daerah (PPD), dapat dilihat dari nilai *p-value* sebesar 0,001 dan F_{hitung} sebesar 10,408

Variabel	Koefisien Regresi	Beta	t	Sig
KONSTAN	-555,34	-	-0,307	0,763
WST	0,012	0,469	1,858	0,084
IND	-3,119	-0,15	-0,713	0,488
LIS	0,055	0,381	1,947	0,072
R^2	= 0,690			
Adjusted R^2	= 0,624			
F	= 10,408			
Sig. F	= 0,001			

Dengan memasukkan nilai koefisien regresi sebagaimana terdapat dalam tabel diatas pada persamaan regresi berganda, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$PPD = -555,340 + 0,012WST - 3,119IND + 0,055LIS$$

1. Nilai koefisien dari variabel jumlah wisatawan (WST) dalam persamaan regresi berganda sebesar 0,012 yang menyatakan bahwa apabila jumlah wisatawan (WST) mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,012%. Hal ini disebabkan, wisatawan yang berkunjung dari dalam atau luar Kabupaten Wonogiri akan mengeluarkan atau membelanjakan uang mereka untuk kebutuhan akomodasi dan membeli cinderamata atau oleh-oleh. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Wonogiri, semakin meningkat pula kegiatan ekonomi di sekitar objek wisata untuk melayani kebutuhan wisatawan. Semakin tinggi kegiatan ekonomi, semakin tinggi pula pajak yang dipungut. Pajak daerah yang dapat dipungut dalam kaitannya dengan jumlah wisatawan adalah pajak hiburan, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir.

2. Nilai koefisien dari variabel jumlah industri (IND) dalam persamaan regresi berganda sebesar -3,119 yang menyatakan bahwa apabila jumlah industri (IND) mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menurunkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 3,119%. Hal ini disebabkan karena jumlah industri di Kabupaten Wonogiri didominasi oleh industri kecil sebanyak 1.002 dari 1.091 usaha. Industri kecil yang semakin banyak akan menyebabkan persaingan antara industri kecil tersebut. Namun, industri kecil akan lebih fokus agar tetap memproduksi daripada mementingkan masalah mempromosikan usaha mereka. Hal ini dikarenakan faktor biaya promosi yang nantinya akan menambah biaya usaha yang akan berdampak pada jalannya produksi. Sehingga promosi hanya mampu dilakukan oleh industri besar yang mempunyai anggaran biaya promosi tersendiri. Namun, jumlah industri besar di Kabupaten Wonogiri jumlahnya cenderung sedikit sehingga pajak yang dipungut pun rendah. Pajak daerah yang dapat dipungut dalam kaitannya dengan jumlah industri adalah pajak reklame.

3. Nilai koefisien dari variabel daya listrik tersambung (LIS) dalam persamaan regresi berganda sebesar 0,055 yang menyatakan bahwa apabila daya listrik tersambung (LIS) mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri 0,055%. Hal ini disebabkan hampir sebagian besar Wajib Pajak membutuhkan daya listrik baik sebagai sarana produksi maupun kehidupan sehari-hari. Semakin meningkatnya jumlah daya listrik tersambung semakin besar pula pajak yang dipungut. Pajak daerah yang dapat dipungut dalam kaitannya dengan daya listrik tersambung adalah pajak penerangan jalan.

Pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri.

Hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel jumlah wisatawan (WST) 0,084 artinya jumlah wisatawan signifikan pada

taraf signifikansi 10%. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa pada tingkat signifikansi 10%, jumlah wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan atau hipotesis pertama gagal ditolak (H_1 diterima), yaitu terdapat pengaruh antara jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri.

Dengan demikian penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nasrul Qadarochman (2010) dan Veronika Winarti Agustiningtyas (2003) bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang, serta Eko Wahyudi (2011) yang mempengaruhi pajak daerah Kota Medan.

Pengaruh jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri.

Hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel jumlah industri (IND) 0,488 artinya jumlah industri tidak signifikan pada taraf signifikansi 10%. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa pada tingkat signifikansi 10%, jumlah industri tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan atau hipotesis kedua ditolak (H_2 ditolak), yaitu tidak terdapat pengaruh antara jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri.

Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Muchtolifah (2010) dan Arshad Darulmalshah Tamara (2009) bahwa industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Pengaruh daya listrik tersambung terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri.

Hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel daya listrik tersambung (LIS) 0,072 artinya daya listrik tersambung signifikan pada taraf signifikansi 10%. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa pada tingkat signifikansi 10%, daya listrik tersambung berpengaruh terhadap

penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan atau hipotesis ketiga gagal ditolak (H_3 diterima), yaitu terdapat pengaruh antara daya listrik tersambung terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri.

Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Veronika Winarti Agustiningtyas (2003) bahwa daya listrik tersambung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 1998-2001.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri, maka hipotesis pertama gagal ditolak (H_1 diterima). Sehingga dapat dinyatakan bahwa besar kecilnya penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri dipengaruhi oleh banyaknya jumlah wisatawan.
- b. Jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri, maka hipotesis kedua ditolak (H_2 ditolak). Sehingga dapat dinyatakan bahwa besar kecilnya penerimaan pajak daerah tidak dipengaruhi oleh banyaknya jumlah industri.
- c. Daya listrik tersambung berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri, maka hipotesis ketiga gagal ditolak (H_3 diterima). Sehingga dapat dinyatakan bahwa besar kecilnya penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh besar kecilnya listrik yang digunakan.

2. Saran

- a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah tahun pengamatan lebih dari 6 tahun, agar dapat digeneralisasikan.
- b. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah variabel yang terkait dengan pajak daerah, yaitu pendapatan penduduk, jumlah penduduk, dan kepatuhan Wajib Pajak.

- c. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan memperluas cakupan penelitian, yaitu lebih dari satu kabupaten, sehingga hasil penelitian mampu dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningtyas, Veronika Winarti. 2003. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah (Tahun 1998-2001)*, Tesis, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2011. *Wonogiri Dalam Angka tahun 2011*. Diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar. 2007. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 289/MPP/Kep/10/2001 *tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Musctholifah. 2010. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto*, Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No. 1, Hal. 1-10.
- Nugradi, Eko Wahyu dan Aisma Syamsi. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pajak Daerah Kota Medan*, Jurnal Visi Ekonomi, Vol 10, No. 01, Hal. 36-44.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011 *Tentang Pajak Daerah*.

- Subhan, Dadan. 2009. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2001-2005*, Jurnal Ilmu Kemasyarakatan Universitas Majalengka, Vol. 3, No. 1 Jan-Apr, Hal. 40-60.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Tamara, Arshad Darulmalshah. 2009. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung (1999-2008)*, Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, Vol. 3, No. 2 November, Hal. 151-172.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Utomo, Yuni Prihadi. 2009. *Eksplorasi Data dan Analisis Regresi dengan SPSS*. Muhammadiyah University Press. Surakarta.
- Yamin, Sofyan dan Heri Kurniawan. 2009. *Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS*. Salemba Infotek. Jakarta.